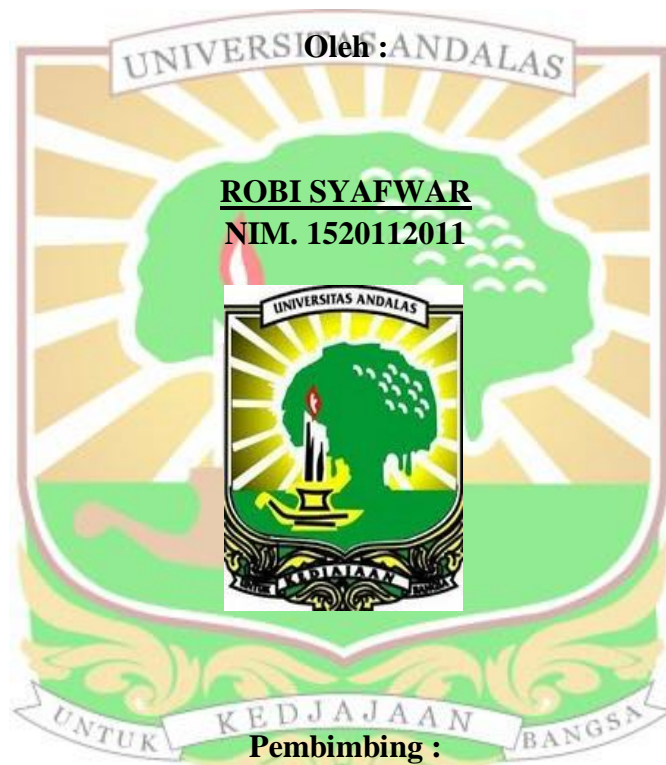


Tesis

**PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI OLEH
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI KABUPATEN AGAM**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum*



1. Dr. Yuslim.,SH.,MH
2. Dr. Azmi Fendri.,SH.,M.Kn

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI KABUPATEN AGAM

(Robi Syafwar, 1520112011, Program Magister Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 118 Halaman, 2017)

ABSTRAK

Meningkat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, dengan berbagai sumber sehingga penggunaan dan peruntukan serta pertanggungjawabannya pun akan bervariasi maka penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan system pengawas dan keseimbangan antar pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi pengawasan, BAMUS memiliki peran yang strategis dalam mengawal dan mengawasi segala sumber keuangan desa tersebut, guna meminimalisir penyalahgunaan, tentu BAMUS harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, Bagaimana pengawasan pengelolaan keuangan nagari oleh BAMUS di Kabupaten Agam, Faktor-faktor yang mempengaruhi BAMUS dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Nagari, Bagaimana penguatan pengawasan BAMUS dalam melakukan pengelolaan keuangan Nagari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. BAMUS menjadi lembaga nagari yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus juga menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari serta menyelenggarakan musyawarah nagari. Ini berarti bahwa BPD fungsi politik yang kuat (representasi, kontrol dan deliberasi) dalam melaksanakan pengawasan dan pengelolaan keuangan nagari dari setiap tahapan mulai perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Beberapa faktor yang mempengaruhi BAMUS dalam melaksanakan fungsi pengawasannya; dimana pemahaman akan tugas dan fungsi yang tidak menyeluruh dari setiap anggota; hubungan antara Wali Nagari dan BAMUS yang belum berjalan maksimal dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan nagari serta proses pembinaan dan pendampingan yang tidak komprehensif dan menyeluruh terhadap BAMUS. Pengaturan BAMUS melalui perda Kabupaten/Kota meskipun memastikan penguatan mekanisme pengisian keanggotaan BAMUS berdasarkan prinsip kualitas dari anggota BAMUS. Perlu adanya membangun hubungan kemitraan terbuka antara Pemerintahan Nagari dengan BAMUS dalam rangka memperkuat pemerintahan desa sehingga setiap aspek perencanaan hingga pertanggungjawabannya dapat terlaksana secara partisipatif, akuntabel dan transparan. Perlu adanya penguatan yang berkelanjutan dan pembinaan yang menyeluruh dilakukan oleh pihak kecamatan/Kabupaten. Praktek-praktek yang terbangun dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam proses rekrutmen BAMUS diharapkan mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang berkembang di dalam masyarakat.

Kata Kunci : Pengawasan, Bamus, Keuangan Nagari, Kabupaten Agam

*SUPERVISION OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT BY VILLAGE
CONSULTATIVE BODY IN AGAM DISTRICT*

*(Robi Syafwar, 1520112011, Master of Law Faculty of Law Andalas University,
Padang, 118 Page, 2017)*

ABSTRACT

Remember of the position, authority and village finance getting stronger so the using, allocation and accountability will be varies therefore the implementation of village government is expected to be more accountable by the supervision and balance system between village government and village institution especially the Village Consultative Body (BAMUS) having supervisory functions in the position. BAMUS has a strategic role in guarding and overseeing the all of village finance resourcesto minimize abuse therefore BAMUS must be able to perform its functions properly. The formulation of the issues in this research was “how the management supervision of village finance by BAMUS in Agam District, the factors affecting BAMUS in monitoring the management of village finance and how strengthen of BAMUS supervision in managing village finance. The research method used is empirical juridical legal research. BAMUS becomes a village institution not only doing governmentfunction but also the function of accommodating and channeling the aspirations of village communities; supervising of the village head performance and organizing deliberation of nagari. This means that BPD has a strong political function (representation, control and deliberation) in carrying out supervision in management of village finance from the each stage startplanning, implementation, and accountability. The several factors influencing BAMUS in carrying out its oversight function; where an understanding of tasks and functions of a part of member; The relationship between village head and BAMUS that has not run maximally in every process of administration of village government and the process of guidance and assistance that is not comprehensive and thorough to BAMUS. BAMUS regulation through local regulation must ensure the strengthening of BAMUS membership charging mechanism based on quality principle of BAMUS member. The need to build an open partnership between the village government and BAMUS in strengthening of village governance so every aspect of planning and accountability can be implemented in a participatory, accountable and transparent. The need for continuous strengthening and comprehensive coaching by sub-district/district. The practices developed in the administration of the village government at the BAMUS recruitment process expected to consider the local values developing in the community.

Keywords: Supervision, BAMUS, village finance, Agam district

